

TESIS

**FAMILISME PADA YAUMIL AMBO DJIWA DAN HERNY AGUS DI
PILKADA PASANGKAYU TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan Oleh :

IBNU KALDUM

E052192002



**PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**FAMILISME PADA YAUMIL AMBO DJIWA - HERNY AGUS DI PILKADA
PASANGKAYU TAHUN 2020**

Nama Mahasiswa : Ibnu Kaldum
Nomor Pokok : E052192002
Program Studi : Ilmu Politik

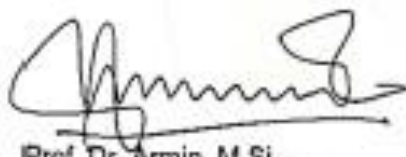
Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister
pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Januari 2024


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Armin, M.Si
NIP. 19651109 199103 1 008



Dr. Anang, S.IP., M.Si
NIP. 19740705 199803 2002

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik



PERNYATAAN PENGAJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ibnu Kaldum
NIM : E052192002
Program : (S2) Ilmu Politik
Studi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruhnya tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yang menyatakan,



Ibnu Kaldum
E052192002

KATA PENGANTAR

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, pemilik segala sesuatu yang kepadanya kita sebagai hambanya akan menghadapkan amal yang dilakukan selama berada didunia fana ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad Saw yang karena perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan moral dan etika, beliau juga sebagai pahlawan yang revolusioner ditengah krisis kepemimpinan di masa suram umat manusia pada zamannya.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini adalah berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi pada Program Strata - 2 (S2) Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof.Dr.Phil.Sukri,S.IP.,M.Si**.selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Dr.Ariana,S.IP.,M.Si.**, selaku ketua Magister ilmu politik pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof.Armin Arsyad, M.Si.**, selaku dosen pembimbing utama dan **Dr. Ariana,S.IP.,M.Si.**, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya dalam mengarahkan dan memberikan saran yang konstruktif kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak **Prof.Dr.Muhammad,S.IP.,M.Si.**, Bapak **Prof.Dr.Phil. Sukri, M.Si**, Almarhum Bapak **Drs.H.A.Yakub,Ph.D** serta **Dr.Muh.Imran.,M.Si**, sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

6. Segenap dosen, pegawai dan seluruh staf Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin, staf perpustakaan pusat yang telah memberikan pengetahuan dalam bidang politik, motivasi dan pelayanannya selama penulis melalui proses perkuliahan hingga dalam proses penyusunan tesis.
7. Ayahanda **Aminuddin,SH** dan Ibunda **Suriani (Alm)** tercinta yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan, motivasi serta doa yang tulus kepada penulis untuk melanjutkan studi jenjang S2 (Magister) hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Segenap Keluarga Besar, **Aljibra, Ummi Kalsum, Ummi Rupaيدا, Ibnu Arabi, Hamsina, Virzan, Arif Aryanto Ridwan, Sulpadli, Ananda Reski Wibowo**,serta **Keluarga besar** di Pasangkayu yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril selama proses penelitian berlangsung hingga pada proses penyelesaian tesis ini.
9. Segenap teman seperjuangan Pascasarjana Ilmu Politik angkatan 2019, **Rangga, Nurfajri Rahim, Supiani, Sulfiana dan Syahrul Maulana** yang senantiasa kebersamai dalam perjuangan menyelesaikan studi .
10. Kepada senior-senior **Kak Darmono, Kak Muliadi, Rahmania**, serta **Khadafi** yang telah memberikan berbagai akses selama proses penelitian berlangsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif dibutuhkan oleh penulis. Semoga segala dukungan dan bantuan semua pihak mendapatkan pahala dari *Allah swt*. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 10 Januari 2024

Ibnu Kaldum
E052192002

ABSTRAK

IBNU KALDUM, Familisme pada Yaumil Ambo Djiwa -- Herry Agus di Pilkada Pasangkayu Tahun 2020 (dibimbing oleh Armin dan Ariana).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi proses yang memengaruhi keluarga besar Ambo Djiwa sehingga berhasil memasang Yaumil Ambo Djiwa -- Herry Agus pada Pilkada Pasangkayu tahun 2020. Adapun teori yang digunakan adalah Familisme, konsep pengambilan keputusan dalam keluarga serta teori kekuasaan keluarga. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder dengan wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yaumil Ambo Djiwa dan Agus Ambo Djiwa merupakan figur yang paling berpengaruh dalam keluarga Ambo Djiwa sehingga pasangan Yaumil Ambo Djiwa dan Herry Agus menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu tahun 2020. Yaumil Ambo Djiwa merupakan figur yang paling dihormati dalam keluarga besar Ambo Djiwa sehingga hal tersebut dikategorikan kedalam kekuasaan referensi, sedangkan Agus Ambo Djiwa cenderung dikategorikan kedalam kekuasaan keahlian (*expert power*) sebab pencapaiannya dalam bidang pendidikan, bidang politik (menjadi Wakil Bupati, Bupati Pasangkayu dua periode dan ketua DPD PDIP Sulawesi Barat). Pencapaian dan pengaruh kedua tokoh tersebut menjadi dasar utama pasangan Yaumil dan Herry mendapat dukungan keluarga untuk maju pada Pilkada Pasangkayu

Kata kunci: familisme, pilkada, kekuasaan, keluarga



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1. Familisme	12
2.1.2 Konsep Pengambilan Keputusan Keluarga.....	17
2.1.3. Teori Kekuasaan Keluarga (<i>Family Power Theory</i>).....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Konseptual.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2 Pendekatan Penelitian.....	33

3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Jenis Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV OBJEK PENELITIAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	41
4.1.1.Letak Geografis.....	41
4.1.2 Kondisi Demografi.....	43
4.1.3.Kondisi Pemerintahan.....	45
4.1.4.Kiprah Keluarga Ambo Djiwa.....	47
BAB V HASIL PENELITIAN.....	56
5.1 Proses Mempengaruhi Keluarga Ambo Djiwa Sehingga Berhasil memasangkan Yaumil Ambo Djiwa dan Herny Agus.....	56
5.1.1Power Relation dalam Keluarga Ambo Djiwa	56
5.1.2 Relasi Saling Membutuhkan Antara Yaumil Ambo Djiwa & Agus Amo Djiwa di Balik Majunya Yaumil – Herny.....	63
5.1.3. Proses Kompromi dalam Keluarga Ambo Djiwa.....	68
BAB VI PENUTUP.....	74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Sebaran Keluarga Petahana di Pilkada Serentak 2020	4
Tabel 1.2	Status Hubungan Keluarga	6
Tabel 2.1	Klasifikasi Familisme	15
Tabel 2.2	Sumber kekuasaan	25
Tabel 3.1	Daftar Informan	37
Tabel 4.1	Daftar Bupati Pasangkayu	45
Tabel 4.2	Perolehan kursi Partai di DPRD Pasangkayu	46
Tabel 5.1	Hasil Pilkada Pasangkayu pada tahun 2005	66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pasangkayu.....	42
Gambar 4.2 Komposisi penduduk berdasarkan generasi	44
Gambar 4.3 Peta satelit nama Jalan Ambo Djiwa di Pasangkayu	49

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	81
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada histori politik Indonesia, terdapat kecenderungan penguasa mendelegasikan tampuk kekuasaan kepada keluarganya, fenomena tersebut terjadi pada masa Orde baru hingga saat ini, masifnya fenomena tersebut diberbagai lintas kekuasaan mulai pada skala nasional maupun lokal (Bambang,2020).

Pada konteks politik lokal, meskipun terdapat perubahan mekanisme dan regulasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik pada masa orde baru hingga saat ini namun masih terdapat pola-pola pemanfaatan *privilege* keluarga yang masih dominan ditemukan pada Pilkada serentak tahun 2020.

Keluarga dan politik pada kebudayaan universal dikategorikan pada organisasi sosial, sehingga antara keluarga dan politik memiliki relasi yang memadai untuk saling mempengaruhi. Posisi politik individu atau kelompok tertentu, ditentukan oleh relasi keluarga yang kuat. Keluarga berperan dalam menciptakan seorang pemimpin politik dengan beragam bentuk dukungan baik dalam bentuk dana maupun moril psikologis.(Dewi Anggraeni,2013).

Maraknya fenomena familisme pada Pilkada Serentak tahun 2020 ditandai dengan masifnya keterlibatan keluarga petahana (*incumbent*) dalam proses Pilkada baik tingkat Gubernur maupun

bupati/walikota. Keikutsertaan keluarga petahana menyebabkan sirkulasi elit cenderung berada pada *inner circle* penguasa saja, padahal semangat reformasi justru menghendaki akses dan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat.

Familisme dan demokrasi seringkali dipertentangkan, familisme dianggap melahirkan *favoritisme, inequality, nepotisme, seksionalisme* dan korupsi, sedangkan demokrasi sebaliknya demokrasi diasumsikan membawa nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, dan kontrol publik. Logika fungsi instrumental keluarga selalu mengutamakan anggota keluarganya dalam melakukan penetrasi dalam ruang publik yang membuat demokrasi di ranah lokal melahirkan berbagai persoalan (Longgina, et Al, 2018).

Praktik keterlibatan keluarga dalam proses regenerasi kuasa di daerah melalui Pilkada penting untuk dikaji melalui aspek politik familisme, sebab beberapa hal *pertama, politik familisme* secara spesifik mendeteksi preferensi dan solidaritas keluarga dalam kontestasi Pilkada, selain itu familisme yang bersifat eksklusif juga berbanding lurus dengan praktik Pilkada tahun 2020 yang menyajikan manuver elit dan anggota keluarganya dalam kontestasi politik. (Djati, 2015)

Dalam konteks global, kajian tentang politik familisme dikembangkan oleh Suad Josep melalui *Politic Familism In Lebanon* yang membahas tentang regenerasi kepemimpinan politik di Lebanon melalui garis keluarga terutama pola ayah ke anak laki-laki, praktik tersebut juga menyajikan

mekanisme politik familisme yang begitu berpengaruh dalam jalannya pemerintahan. (Joseph,2011)

Pada konteks lokal terdapat kajian yang dilakukan oleh Jihan Azzahra yang membahas tentang Politik Familisme di Tubuh Partai Islam Lokal di PPP Rembang , menariknya politik familisme telah menjalar sampai pada kepengurusan partai, susunan anggota legislatif dan pengambilan keputusan politik lainnya (Laila Al-Firdaus,2019). Kajian politik familisme yang terjadi di Lebanon dan PPP Rembang menunjukkan bahwa ekspansi keluarga dalam institusi politik begitu nyata dan perlu mendapatkan perhatian serius dalam kajian politik kekinian.

Kajian Suad Joseph dan Jihan Azzahra tersebut merupakan bukti faktual bahwa kajian politik familisme mengambil peran dan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan kehadiran keluarga dalam siklus kepemimpinan baik pada tataran kepartain maupun pemerintahan.

Kedua, merujuk pada laporan Indonesia Report 2020 bahwa praktik Pilkada 2020 cenderung masuk dalam katagori familisme dengan mengacu pada beberapa Indikator yaitu apabila calon kepala daerah tersebut memiliki ikatan darah, merupakan keluarga inti atau kerabat yang paling dekat dan bersifat tertutup (Adinda, 2020). Temuan Negara Institute tersebut menunjukkan bahwa terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan petahana (*incumbent*) dan maju sebagai calon kepala daerah .

Ketiga, pada tataran konseptual, terdapat kecenderungan penggunaan konsep politik dinasti,politik kekerabatan, dalam melihat

proses regenerasi kekuasaan baik ditingkat nasional maupun lokal, padahal jika merujuk definisi dinasti politik para ahli masih terdapat dimensi jumlah, dimensi ruang dan serta dimensi kekuasaan yang patut direview kembali dalam menjelaskan keberadaan keluarga pada struktur kekuasaan maupun proses mencapai dan mempertahankan kekuasaan.

Politik dinasti dimaknai sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan mendudukan keluarganya pada jabatan politik, minimal 4 anggota keluarga yang menduduki jabatan politik dan lebih dari 2 generasi (Titin Purwaningsih, 2015)

Politik kekerabatan pun demikian, politik kekerabatan terjadi apabila rekrutmen politik berdasarkan kepada perimbangan hubungan kekerabatan dan tidak berdasarkan pada aspek kualifikasi kandidat sedangkan familisme justru tidak terikat oleh dimensi jumlah keluarga dalam pemerintahan atau jabatan politik tertentu serta aspek kualifikasi kandidat namun lebih merujuk pada sumber dan pengaruh keluarga tertentu dalam proses regenerasi kekuasaan, meskipun terdapat perbedaan ketiga istilah tersebut, namun terkadang digunakan secara opsional oleh para ahli untuk mengidentifikasi keberadaan keluarga dalam struktur kekuasaan.

Tabel 1.1 Sebaran Keluarga Petahana di Pilkada Serentak 2020

Afiliasi Politik Berdasarkan Jabatan						
Jabatan	Gubernur	Wakil Gubernur	Walikota	Wakil Walikota	Bupati	Wakil Bupati
Jumlah	5	4	20	8	57	30

(Sumber : Nagara Institut , 2021)

Fenomena maraknya calon kepala daerah yang memiliki afiliasi dengan petahana ini menjadi ujian penguatan demokrasi di ranah lokal walaupun setiap warga memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam politik namun politik familisme sangat rentan dengan *abuse of power* yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan di daerah dan penguatan demokrasi lokal.

Catatan penting terhadap praktik Pilkada Serentak tahun 2020 tersebut merupakan problematika yang disoroti dalam skala politik lokal, harapan untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia yang idealnya dimulai dari tataran lokal, Tip Oneill menyatakan bahwa "*all politics is local*" yang dapat dimaknai sebagai demokrasi di tataran nasional akan tumbuh dan berkembang dengan mapan serta dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu.

Sorotan terhadap keterlibatan calon kepala daerah yang terafiliasi dengan familisme menjadi kajian penting dan menarik dalam melihat perkembangan prospek politik lokal. Secara khusus The Indonesian Institut merilis data bahwa calon kepala daerah memiliki ikatan keluarga dan kerabat petahana terjadi di 30 daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Ikatan keluarga kandidat kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Status hubungan keluarga

No	Status	Jumlah
1	Anak	22

2	Istri	15
3	Adik	8
4	Kakak	2
5	Ayah	1
6	Kerabat Dekat	2
		50

(Sumber, Adinda, 2020)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ikatan keluarga mempunyai peran krusial pada regenerasi kekuasaan yang didesain oleh petahana, tidak sampai disitu partai politik yang seharusnya menjalankan fungsi rekrutmen justru cenderung memberikan dukungan kepada keluarga petahana sekalipun bukan dari kader partai politik. (Titin Purwaningsih,2009).

Fenomena anggota keluarga yang turut serta dalam Pilkada menimbulkan kekhawatiran adanya ketidaksetaraan pada distribusi kekuasaan politik sehingga dapat mencerminkan kelemahan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut kekuasaan melahirkan kekuatan (Gunanto,2020)

Pendapat lain mengatakan bahwa kecenderungan, praktik familisme oleh kepala daerah untuk mewariskan kekuasaan kepada orang terdekat atau kerabatnya baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota disebabkan oleh beberapa hal misalnya karena mahal nya *cost*, serta macetnya fungsi kaderisasi partai yang berimplikasi pada terjadinya

pragmatisme dengan mengusung para elite tersebut dalam kontestasi Pilkada.(Djati,2015)

Menyoroti berbagai temuan penting Negara Insitut dan *The Indonesian Institut* yang melibatkan keluarga inti (melalui hubungan darah dan perkawinan) dalam proses regenerasi kekuasaan melalui Pilkada maka kajian tentang Familisme dapat menjadi alternatif dalam melihat eksistensi keluarga dalam lokus politik lokal baik pada saat kandidasi maupun sampai pada tahap kemenangan.

Praktik familisme yang terjadi di Pilkada 2020 dapat dilihat misalnya pada Pilkada Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (calon walikota Fikar Azami merupakan anak dari Walikota yang kini menjabat yaitu Asafri Jaya Bakri, Pilwakot Binjai, Sumatera Utara (Lisa Andriani Lubis merupakan istri dari Walikota Binjai yaitu HM Idaham, sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Pilkada Pangkajene dan Kepulauan menyajikan pasangan Andi Ilham Zainuddin – Rismayanti merupakan perpaduan Ipar dan istri Syamsuddin A.Hamid, sedangkan paslon lainnya Muhammad Yusran Lologau merupakan keponakan Syamsuddin A.Hamid (Nagara Institut,2021).

Kondisi tersebut menyebabkan adanya rivalitas antar keluarga Syamsuddin A.Hamid melalui jalur perkawinan (*marriage*) dan keponakan (*consanguinity*), menariknya Pilkada yang lebih kental dengan kategori familisme adalah pasangan Calon Bupati Yaumil Ambo Djiwa dan Herny Agus Ambo Djiwa pada Pilkada Pasangkayu sebab calon bupati dan wakil bupati Pasangkayu merupakan perpaduan kakak dan istri (kombinasi

consanguinity dan *marriage*) dari bupati yang sedang menjabat pada saat Pilkada yaitu Agus Ambo Djiwa.

Pilkada Pasangkayu menjadi perhatian nasional dan tinjauan penting dalam Pilkada serentak 2020 disebabkan mencuatnya aspek praktik familisme pada pasangan calon Nomor urut tiga (3) Yaumil Ambo Djiwa Hery Agus pada Pilkada Pasangkayu. Kombinasi keduanya merupakan kakak dan istri dari bupati Pasangkayu yaitu Agus Ambo Djiwa.

Hal tersebut menarik untuk dikaji sebab memiliki karakteristik yang berbeda dengan mekanisme pencalonan yang notabene mempertimbangkan aspek-aspek yang variatif, misalnya pertimbangan kualitas kandidat, popularitas kandidat, kompetensi kandidat, kapabilitas kandidat, termasuk di dalamnya adalah moralitas kandidat yang diusung oleh partai politik (Gregorius,2009) namun untuk membatasi ruang lingkup kajian ini, perlu untuk memotret mekanisme yang terjadi dalam internal keluarga Ambo Djiwa, sehingga pasangan Yaumil Ambo Djiwa – Hery Agus dapat menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Pasangkayu tahun 2020.

Manuver politik yang dilakukan oleh keluarga Yaumil Ambo Djiwa – Hery Agus sehingga dapat berpasangan sebagai calon bupati dan wakil bupati merupakan hal menarik untuk dikaji, sebab keluarga dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kecakapan politik seseorang, keluarga berperan sebagai poros utama dalam sosialisasi

politik, pembentukan sikap politik, menambah kecakapan politik serta mendukung anggota keluarganya berpartisipasi dalam politik (Muhtar Habodin,2017), berdasarkan hal tersebut posisi sentral keluarga dalam mengorbitkan anggota keluarganya menarik untuk diidentifikasi dan dikaji secara mendalam melalui studi ini.

Proses pra pemilihan sangat krusial dalam melihat rangkaian Pilkada secara holistik, fenomena Pilkada tidak hanya merujuk pada persaingan elektoral semata justru diawali pada manuver elit, jaringan keluarga yang tersebar di berbagai posisi strategis yang mengendalikan berbagai sumber daya dan akses kekuasaan serta mengendalikan berbagai proses pra pemilihan. Keluarga berpotensi memainkan semua institusi formal dalam mempengaruhi proses politik dengan mengandalkan kekuatan jaringan politik yang ada (Andi Yakub,2022)

Pola pengajuan kandidat yang berasal dari segmen keluarga yang sama dan memiliki keterkaitan dengan petahana telah dikaji dalam beberapa studi namun dalam studi ini, mekanisme internal dalam keluarga patut untuk ditelusuri guna melihat manuver politik yang dilakukan oleh anggota keluarga maupun kandidat sehingga dapat memenuhi regulasi pencalonan kepala daerah.

Studi ini memiliki kebaruan dalam mengidentifikasi proses politik yang bekerja dalam penentuan pasangan calon oleh keluarga Yaumil-Ambo Djiwa – Herny Agus, terlebih bersatunya 2 anggota keluarga Ambo Djiwa menjadi 1 paket pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada

Pasangkayu. Logika *by desain* atau *by accident* pada pasangan Yaumil-Ambo Djiwa – Herny akan menentukan pola-pola kandidasi keduanya dan berbagai item penting yang menunjang bersatunya 2 anggota keluarga Ambo Djiwa dalam 1 pasang calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Pasangkayu.

Pada akhirnya studi ini akan mengidentifikasi mekanisme *selection* yang mendahului *election*, dalam *election* inilah nalar elit keluarga bekerja sebelum sampai pada *qualification* (prasyarat konstitusional) dan *election* (Pilkada), pada level *selection* inilah politik electoral tidak banyak disentuh karena semua memberikan atensi yang besar pada tahapan *public election*/Pilkada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses mempengaruhi keluarga besar Ambo Djiwa sehingga berhasil memasang Yaumil Ambo Djiwa dan Herny Agus di Pilkada Pasangkayu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan hal tersebut tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- 1.3.1 Untuk menganalisis dan memproyeksikan proses serta cara kerja keluarga Agus Ambo Djiwa dalam proses memasang

Yaumil Ambo Djiwa dan Herny Agus Ambo Djiwa di Pilkada Pasangkayu.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Penelitian

- (a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian politik lokal khususnya terkait dengan fenomena familisme yang masih belum marak diteliti.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- (a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemetaan kondisi politik lokal khususnya di Sulawesi Barat.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan konsep dan teori yang menjadi dasar penelitian ini sehingga peneliti dapat memahami tema penulisan sesuai dengan landasan yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini juga mencakup karya penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan serta kerangka konseptual yang digunakan untuk memudahkan memahami penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Familisme*

Pada kajian ilmu sosial politik, familisme dimaknai sebagai ketergantungan yang dominan pada ikatan keluarga yang menyebabkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya (Djati,2015). Pendapat lain tentang Familisme yaitu menurut Adela Garzon, familisme dipahami sebagai *new social order*, yaitu dorongan psikologis bagi seseorang untuk berkarir di dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta.(Garzon,2003)

Familisme diartikan sebagai paham yang mengutamakan kepentingan keluarga atas kepentingan individu atau kepentingan sosial lainnya (Longgina,et Al,2018). Familisme juga dimaknai sebagai paham

yang sering melibatkan keluarga terdekatnya untuk meraih sebuah tujuan ataupun kepentingan yang dimiliki.

Familisme banyak dianggap sebagai pola yang sangat egoistik terhadap pemahamannya dan sekitar lingkungannya. Selain itu, paham dari gaya ini seringkali dijadikan sebagai senjata oleh pihak-pihak yang telah memiliki popularitas dan citra yang terpendang di masyarakat, meskipun demikian familisme memiliki citra yang cukup baik jika digunakan dalam ke arah dan aliran yang positif. Misalnya saja, kerjasama di dalam keluarga. Namun, seiring dengan perkembangannya istilah tersebut mulai memiliki ranah negatif karena sering dibaca oleh masyarakat sebagai pola sosial yang memancing perhatian khalayak ramai untuk memberikan mereka panggung.

Indikator utama familisme yaitu hubungan keluarga, kesejahteraan keluarga, pentingnya ikatan darah serta ketergantungan terhadap keluarga. (Yang, 1998). Familisme adalah salah satu model organisasi sosial yang mengacu pada loyalitas, kepercayaan dan sifat saling mendukung satu sama lain.

Pelaku kelompok keluarga tersebut mengandalkan citra dan kepentingan mereka untuk mendapatkan *reward* dan nama di depan publik, sehingga familisme dimaknai sebagai upaya keluarga untuk memprioritaskan anggota keluarga untuk mencapai kedudukan serta jabatan politik .

Faktor yang mempengaruhi pembentukan preferensi familisme yaitu faktor figurisasi dan faktor afeksional. Pada proses figurisasi sebagai daya tarik pemilih yang kemudian dimodifikasi menjadi dasar politis seseorang untuk menggaet kerabatnya dalam lingkaran kekuasaan, sedangkan pada faktor afeksional, seperti kepercayaan (*trust*), solidaritas (*solidarity*) maupun soliditas (*solidity*) yang secara keseluruhan turut menentukan eksistensi keluarga politik, baik antara anggota internal keluarga serta kroni-kroni yang berada pada lingkaran kekuasaannya (Djati, 2015).

Terdapat 3 varian familisme dalam membicarakan keluarga politik dalam konteks ini. Pertama adalah familisme (*familism*), yakni keluarga politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) dengan klan lainnya. Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut.

Kedua adalah *Quasi-familisme*. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut. (Djati, 2015).

Ketiga adalah *Egoisme-familisme*. Model keluarga politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya

menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan (Djati, 2015). Secara sederhana konsepsi politik familisme dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Klasifikasi Familisme

No	Indikator	<i>Familisme</i>	<i>Quasi Familisme</i>	<i>Ego Familism</i>
1	Dasar Pembentukan Keluarga Politik	Hubungan darah langsung (<i>consanguinity</i>) dan hubungan perkawinan (<i>marriage</i>)	Hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan, dan soliditas dalam keluarga besar maupun kroninya	Dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional
2	Kaderisasi	Anggota keluarga inti dan krooni	Sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan (<i>hereditary</i>)	Keluarga inti
3	Sifat	Tertutup	Semi tertutup	Tertutup

(Sumber : Djati,2015)

Penggunaan konsep familisme untuk mengidentifikasi berhasilnya pasangan Yaumil Agus Ambo Djiwa dan Herny Agus menjadi pasangan Calon bupati dan wakil Bupati pada Pilkada Pasangkayu tahun 2020,

mengalahkan berbagai nama-nama yang bisa saja memiliki potensi untuk menjadi bakal calon Bupati dan wakil bupati Pasangkayu, nyatanya proses politik tidak hanya terjadi pada saat masa kampanye untuk menggaet pemilih namun proses politik dalam kandidasi merupakan proses awal dalam menentukan calon yang akan bertarung pada Pilkada serentak bahkan juga berlangsung dalam internal keluarga. Terdapat 3 karakteristik dasar familisme, yaitu :

1. Familisme mengandung seperangkat kewajiban yang berisi harapan , peran, sikap, perilaku dan persepsi yang wajib dijalankan.
2. Familisme bersifat eksklusif yaitu selalu selalu berorientasi pada anggota-anggota keluarganya.
3. Familisme menekankan solidaritas keluarga sebagai fungsi psikologis dan instrumental.(Longgana dkk,2018)

Suad Joseph berpendapat bahwa familisme berorientasi pada penyebaran institusi keluarga, ideologi, idiom (kekerabatan idiomatik), praktik, dan hubungan oleh warganegara mengaktifkan kebutuhan dan tuntutan mereka sehubungan dengan negara atau pemerintahan dan negara atau aktor negara untuk memobilisasi dasar praktis dan moral untuk pemerintahan berdasarkan mitos kekerabatan sipil dan wacana publik yang memberi hak istimewa kepada keluarga (Suad Joseph,2011).

Menurut Francis Fukuyama, ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga dapat menimbulkan akibat buruk bagi Masyarakat yang lebih luas daripada lingkup keluarga. Familisme diartikan sebagai

kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Familisme mengarah ke nepotisme (Fukuyama,2005).

Familisme dibentuk oleh 3 hal yaitu figur (*personalism*) *klientalism* (*clientalisme*) dan tribalisme (*tribalism*) sebagai ketiga kunci untuk mengurai basis-basis terbentuknya tren familisme kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia (Fahrurrozi,2017). Konsep tersebut digunakan untuk melihat fenomena pasangan calon Yaumil Ambo Djiwa dan Hery Agus pada mekanisme internal keluarga yang menyebabkan pasangan tersebut dapat mencalonkan diri pada Pilkada Pasangkayu tahun 2020.

2.1.2 Konsep Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga

Pola pengambilan keputusan (*decision making*) pada suatu keluarga mendeskripsikan bagaimana struktur atau pola kekuasaan dalam keluarga ditentukan. David dan Rigaux (Asmal Ishak,1992) telah mengidentifikasi bahwa struktur pengambilan keputusan dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu :

1. *Wife dominant decision* adalah tipe keputusan yang dominan diwarnai oleh pengaruh pihak istri daripada pengaruh anggota keluarga lainnya.
2. *Husband dominant decision*, adalah tipe keputusan yang dominan diwarnai oleh pengaruh pihak suami daripada pengaruh keluarga lainnya.

3. *Syncratic decision* adalah tipe keputusan yang merupakan hasil kesepakatan suami dan istri. Bentuk keputusan ini pengaruh suami dan istri adalah seimbang.
4. *Automic decision*, adalah tipe keputusan ini terjadi jika masing-masing suami dan istri secara individual bertanggung jawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai tradisionalnya.

Struktur pengambilan keputusan dalam keluarga tersebut bersifat mikro, artinya hanya berlaku dalam *nuclear family* atau keluarga inti. Untuk memperdalam proses pengidentifikasian mengenai figur sentral atau *king maker* yang berpotensi berasal dari *extended family* atau keluarga besar maka tipe pengambilan keputusan pada skala yang lebih besar juga diperlukan. Menurut Guharja Et Al (1989) ada 3 Tipe pengambilan keputusan dalam keluarga, yaitu :

1. Pengambilan Keputusan Konsesus

Pengambilan keputusan consensus merupakan pengambilan keputusan secara bersama-sama antar anggota keluarga mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan akan menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga.

2. Pengambilan Keputusan Akomodatif

Pengambilan keputusan akomodatif ini dicirikan oleh adanya orang yang dominan sehingga keputusan yang diambil adalah dengan menerima pendapat orang yang dominan tersebut, karena hanya orang tertentu yang

akan merasa puas, maka ada dua akibat dari pengambilan keputusan ini, yakni: keputusan ini akan dilakukan oleh orang lain dengan persyaratan dan dalam melaksanakan keputusan akan didominasi oleh orang-orang yang mempunyai pendapat tersebut.

3. Pengambilan keputusan *De Facto*

Berbeda dengan 2 bentuk pengambilan keputusan sebelumnya, pengambilan keputusan *De Facto* justru cenderung dipilih karena kecenderungan terhadap adanya paksaan.

Konsep pengambilan keputusan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi lebih dalam terkait mekanisme pengambilan keputusan keluarga Ambo Djiwa pada proses majunya Yaumil-Herny di Pilkada Pasangkayu tahun 2020.

2.1.3 Teori Kekuasaan Keluarga (*Family Power Theory*)

Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan potensial/aktual dari individu untuk mengendalikan, mempengaruhi, serta mengubah perilaku orang lain. Sedangkan menurut Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama.(Miriam Budiarjo,2008).

Politik sebagai kekuasaan adalah definisi yang paling luas sekaligus dianggap yang paling radikal, daripada memberikan limitasi pada sebuah lingkup tertentu (pemerintahan,Negara, atau lingkup publik) pandangan ini

justru memandang bahwa politik berlangsung di semua aktivitas sosial dan disetiap sudut dari eksistensi manusia (Andrew Heywood,2013).

Adrian Leftwich (2004) menyatakan bahwa politik merupakan jantung dari segala aktivitas sosial kolektif, formal maupun informal, publik maupun privat, di segala kelompok, lembaga serta masyarakat manusia. Pengertian tersebut memaknai bahwa politik berlangsung disetiap level interaksi sosial, dapat berlangsung di keluarga dan diantara kelompok kecil persahabatan sama banyaknya sebagaimana yang berlangsung di antara bangsa dan pada level global. Pendapat Adrian Leftwich tersebut mengafirmasi bahwa penetrasi kekuasaan dalam keluarga adalah hal yang sesuai dengan ruang lingkup studi politik.

Faucault mengartikan kekuasaan bisa saja lahir darimana saja dan dimana saja, kekuasaan dapat terjadi pada sebuah relasi, dimana dalam setiap relasi pasti ada kekuasaan (Faucault,1997), Faucault menjabarkan bahwa bentuk kekuasaan tidak serta merta hanya dapat dijumpai pada tatanan negara namun sangat mungkin kekuasaan dapat dijumpai dimana saja. Disisi lain kekuasaan dalam pemahaman Faucault terhadap kekuasaan tidak jauh dari strategi yang diatur sedemikian rupa dan berlangsung dimana-mana yang didalamnya terdapat instrumen-instrumen kekuasaan meliputi aturan,sistem, regulasi beserta struktur susunannya.

Kekuasaan tidak berasal dari luar,namun dari interaksi dan relasi antar sesama manusia yang membuka lebar potensi terbentuknya kekuasaan. Begitupun pada relasi dalam keluarga, antara seorang ayah

dengan anggota keluarga lainnya yang mana akan dijumpai pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai.

Kekuasaan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan potensial/aktual dari individu keluarga untuk mengubah perilaku anggota keluarga yang lain. Cromwell dan Olson (1975) membagi kekuasaan keluarga menjadi 3 bidang, yaitu : dasar kekuasaan, proses kekuasaan serta hasil pembuatan keputusan atau kekuasaan.

1. Dasar Kekuasaan (*Bases of Family Power*)

Dasar Kekuasaan pada konteks keluarga mengikutsertakan berbagai dimensi dan jenis kekuasaan yang memengaruhi dinamika hubungan antar anggota keluarga. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait dengan interaksi dan pengaruh kekuasaan pada lingkup keluarga. Berikut adalah gambaran rinci dari dasar-dasar kekuasaan keluarga :

a. Kekuasaan atau Wewenang yang Sah

Kekuasaan ini muncul dari struktur otoritas yang legal pada keluarga , seperti peran orang tua atau kepala keluarga. Hal ini meliputi kewenangan untuk membuat keputusan dan memberikan arahan kepada anggota keluarga lainnya. Kekuasaan ini dapat bersifat hierarkis dan diterima secara umum dalam norma-norma keluarga.

b. Kekuasaan yang Tidak Berdaya atau Putus Asa

Terdapat kekuasaan yang bersumber dari ketidakberdayaan atau rasa putus asa. Anggota keluarga merasa tidak memiliki kontrol atas situasi

atau merasa tunduk pada keadaan tertentu. Hal ini bisa memunculkan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks dan perlu pemahaman mendalam.

c. Kekuasaan Referen

Kekuasaan referen berkaitan pada pengaruh yang dimiliki oleh seseorang dalam keluarga karena karakteristik pribadi, kepribadian, atau kelebihan lainnya. Anggota keluarga cenderung mengikuti atau taat pada individu tertentu karena mereka menghargai atau mengidolakannya.

d. Kekuasaan Ahli dan Sumber

Kekuasaan ini berkaitan dengan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang pada keluarga. Figur yang dianggap sebagai ahli atau memiliki akses ke sumber daya tertentu mungkin memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan atau arahan keluarga.

e. Kekuasaan Penghargaan

Kekuasaan ini muncul dari kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan atau ganjaran kepada anggota keluarga. Hal tersebut mencakup dukungan emosional, pujian, atau bentuk penghargaan lainnya yang memperkuat perilaku tertentu.

f. Kekuasaan Dominasi atau Paksaan

Kekuasaan dominan atau paksaan bersifat dominan atau paksaan, seseorang dalam keluarga cenderung menggunakan tekanan fisik atau psikologis untuk mendominasi anggota keluarga lainnya. Dinamika

kekuasaan semacam ini dapat merugikan dan perlu diatasi untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam keluarga.

g. **Kekuasaan Informasional**

Kekuasaan ini timbul dari kendali informasi atau akses terhadap informasi tertentu. Seseorang yang mempunyai kontrol atas informasi mungkin memiliki keunggulan pada pengambilan keputusan atau membentuk persepsi anggota keluarga lainnya.

h. **Kekuasaan Afektif**

Kekuasaan afektif pada dengan pengaruh yang berasal dari ekspresi emosional. Seseorang yang mahir mengelola atau mengarahkan emosi dalam keluarga dapat memainkan peran krusial dalam pengaruhnya terhadap orang lain.

i. **Kekuasaan Manajemen Ketegangan**

Kekuasaan ini terkait pada kemampuan seseorang untuk mengelola konflik atau ketegangan pada keluarga. Individu yang mampu meredakan ketegangan atau menyelesaikan konflik dapat memiliki dampak positif pada dinamika keluarga secara keseluruhan.

Kekuasaan berdasarkan sumbernya menurut Robbins dan Judge (2007) menjadi 2 kelompok besar yaitu sumber kekuasaan antar individu (*interpersonal sources of power*) dan sumber kekuasaan struktural (*structural sources of power*). Sumber kekuasaan antar individu (*interpersonal sources of power*) kemudian terdiri dari 2 bentuk yaitu Pertama, kekuasaan formal (*Formal power*) yaitu kekuasaan yang merujuk

pada posisi individual dalam suatu organisasi/institusi. Kekuasaan formal tersebut mencakup kemampuan untuk memaksa (*coercive power*), kemampuan untuk memberi imbalan (*reward power*) serta kekuatan formal (*legitimate power*). Kedua, kekuasaan personal (*personal power*) yang didefinisikan sebagai kekuasaan yang berasal dari karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang individu, kekuasaan ini dapat berasal dari kekuasaan karena dianggap ahli (*Expert power*) serta kekuasaan karena dijadikan contoh/tauladan (*Referent Power*).

Sumber Kekuasaan struktural (*struktural sources of power*) berbeda dengan sumber kekuasaan individu yang cenderung memotret posisi individu, sumber kekuasaan struktural yang memiliki kecenderungan dikenal sebagai istilah *inter-group* atau *inter-departmental power* yang merupakan sumber kekuasaan kelompok. Saunders (Brooks,2006) menguraikan bahwa kekuasaan pada tingkat kelompok dapat berasal dari ketergantungan (*dependency*), kesentralan (*centrality*), sumber dana (*Financial Resources*) ketidakberlanjutan (*non-sustainability*) serta menghadapi ketidakpastian (*copying with uncertainty*).

Kekuasaan tidak terbatas pada konteks pemerintahan saja, melainkan kekuasaan juga hadir dalam berbagai sektor kehidupan seseorang/individu sepanjang hidupnya. Kekuasaan hadir dalam berbagai ruang lingkup misalnya keluarga, pada sektor pekerjaan, pada jenis lingkungan hidup yang cenderung mengatur, memaksa, menata, dan

mengarahkan tanpa mereka sadari dan pahami. Hal tersebut dapat diklasifikasikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.2 Sumber kekuasaan

Posisi/Kedudukan(Kekuasaan)	Kewenangan Formal
	Kontrol atas sumber dan <i>reward</i>
	Kontrol atas hukuman
	Kontrol atas informasi
	Kontrol atas ekologi
Personal (Kekuasaan)	Keahlian
	Loyalitas/Kedekatan
	Karisma
Politik (Kekuasaan)	Kontrol atas proses pembuatan keputusan
	Koalisi
	Kooperasi (kerjasama)
	Kelembagaan

(Sumber : Miftah Toha, 2016)

2. Proses Kekuasaan Dalam Keluarga (*Family Power Processes*)

Proses kekuasaan dalam konteks keluarga merangkum serangkaian langkah dan mekanisme yang digunakan oleh individu dalam keluarga untuk mempengaruhi anggota lainnya. Kekuasaan dalam keluarga tidak hanya mencakup aspek otoritas formal, tetapi juga mengikutsertakan sejumlah tindakan yang merepresentasikan interaksi dan dinamika interpersonal yang kompleks dan dinamis.

Pada proses kekuasaan keluarga, individu memakai berbagai cara, mulai dari pengaruh dan persuasi hingga pemaksaan, untuk mencapai perubahan perilaku atau membentuk struktur kekuasaan dalam lingkup keluarga. Pengaruh menjadi elemen kunci dalam proses kekuasaan keluarga.

Individu menggunakan pengaruh mereka untuk mencoba membentuk pandangan, nilai, atau tindakan anggota keluarga lainnya. Dengan memanfaatkan komunikasi dan interaksi sehari-hari, mereka berusaha meraih dukungan atau persetujuan terhadap ide, gagasan, atau keputusan tertentu. Pengaruh ini mencerminkan upaya membangun kesepakatan dan konsensus didalam keluarga, meskipun tanpa elemen paksaan yang nyata.

Selain itu, proses kekuasaan juga melibatkan unsur persuasif, di mana individu menggunakan argumentasi atau pendekatan yang meyakinkan untuk membujuk anggota keluarga lainnya mengikuti suatu arah atau keputusan. Persuasif meliputi kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang dapat merubah pandangan atau sikap orang lain, menciptakan dasar bagi perubahan perilaku atau penerimaan suatu ide.

Dengan demikian, proses kekuasaan keluarga menciptakan kerangka kerja dinamis dimana interaksi, komunikasi, dan konflik merajut pola-pola kompleks. Pemahaman terhadap proses kekuasaan ini dapat membantu mengidentifikasi dinamika keluarga, memfasilitasi komunikasi yang sehat, dan memastikan bahwa struktur kekuasaan yang berkembang di dalam keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya. (Cynthia Webster, 1998)

3. Hasil Pembuatan Keputusan dalam Keluarga (*Family Power Outcomes*)

Hasil pembuatan keputusan atau kekuasaan dalam konteks keluarga mencerminkan buah dari suatu proses dinamis di mana anggota keluarga berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Hasil pembuatan keputusan mencerminkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan diaplikasikan dalam dinamika keluarga, menjadi tolok ukur keberhasilan dari proses tersebut. (Asti Melani Astari, 2008)

Dengan memahami bahwa hasil pembuatan keputusan adalah cermin dari proses kekuasaan yang berlangsung di dalam keluarga, anggota keluarga dapat terus berupaya untuk mengembangkan pola komunikasi yang sehat, membuka ruang untuk partisipasi setiap anggota keluarga, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan bersama. Dengan demikian, hasil pembuatan keputusan dapat menjadi indikator yang jelas tentang keberhasilan kekuasaan keluarga yang mendukung kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (Cynthia Webster, 1988).

Family power yang dicetuskan oleh Cromwell dan Olson ini merupakan teori klasik dan digunakan pada berbagai studi keluarga, aspek *base of family power*, *family power process* serta *family power outcomes*, hal tersebut dapat digunakan untuk menjawab masalah keberfungsian

kekuasaan pada keluarga terutama dalam menentukan kemunculan pasangan Yaumil-Herny di Pilkada Pasangkayu.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Wasisto Raharjo Jati (2015), *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. Penelitian tersebut menguraikan tentang fenomena dinasti politik yang terjadi di Indonesia, menguatnya budaya politik familisme menjadi perhatian khusus dalam penelitian tersebut, disebabkan karena fenomena gagalnya partai politik melakukan regenerasi politik, kedua biaya demokrasi yang tinggi, ketiga perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak terciptasehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti.

Terdapat perbedaan signifikan dalam penelitian Djati dengan penelitian ini terutama pada aspek cakupan wilayah/kasus yang diteliti. Penelitian Djati melihat berbagai fenomena dinasti politik di berbagai wilayah misalnya di Provinsi Banten, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kendal, Kabupaten Indramayu dan sebagainya.

Pengembangan kajian dinasti politik dengan menggunakan konsep familisme menyebabkan konsep ini lebih mengarah pada proses pengklasifikasian, padahal bisa saja banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan antara 1 wilayah dengan wilayah lain, sehingga penelitian ini akan lebih melihat fenomena familisme secara khusus dan spesifik pada Pilkada Pasangkayu terutama pada mekanisme pengambilan

keputusan oleh keluarga Yaumil-Herny sehingga pasangan tersebut mendapatkan mandat dari keluarga mereka.

2.2.2 Suad Josep (2011), dalam artikelnya yang berjudul *Familism In Lebanon*, penelitian ini membahas tentang hubungan antara negara dan warga di Lebanon dengan menggunakan konsep politik familisme, kepemimpinan politik di Lebanon berlanjut melalui garis keluarga. Kepemimpinan blok politik yang biasanya diturunkan dari ayah ke anak laki-laki, (jarang terjadi kepada istri atau anak perempuan). Anggapan bahwa anak laki-laki akan menggantikan ayah dalam posisi kekuasaan politik dan jabatan politik melembagakan familisme politik di dalam aparatur negara dan mempromosikan politik keluarga elektoral.

Kajian Josep secara komprehensif menguraikan politik familisme bahkan hingga pada aspek historis dan perkembangan peran keluarga dalam proses politik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada aspek ruang lingkup penelitian, meskipun kondisi politik nasional dan daerah memiliki keterkaitan, namun fenomena familisme di Pasangkayu justru secara spesifik mendeteksi peran keluarga dalam pengambilan keputusan oleh keluarga Yaumil Ambo Djiwa-Herny Agus pada Pilkada Pasangkayu.

2.2.3 Laila Kholid Alfirdaus (2019) dalam artikelnya yang berjudul *Politik Familisme di tubuh partai Islam Lokal*, penelitian ini membahas tentang konteks pembentukan politik familisme, struktur serta implikasinya terhadap PPP di Kota Rembang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PPP Rembang bertumbuh dari budaya masyarakat serta struktur sosial yang terbentuk di masyarakat. Politik familisme di PPP tumbuh dari budaya dan tradisi pesantren, karena kiai dan keluarga turut serta mengisi struktur inti kepartaian, dan relasi kiai-santri memperkuat struktur familisme kepartaian didalamnya.

Penelitian Laila Kholid Alfirdaus ini menarik sebab beberapa riset justru lebih menonjolkan fenomena politik familisme pada motif kuasa dan bisnis, meskipun demikian politik familisme yang terjadi pada partai PPP mengalami perbedaan yang signifikan dengan fenomena familisme yang terjadi di Pasangkayu, sebab pasangan Yaumil – Herny akan dilihat dari sisi pola pengambilan keputusan oleh keluarga Yaumil – Herny Agus.

2.2.4 Muhtar Haboddin (2017) dalam artikelnya, Politik Keluarga dalam Pilkada, penelitian ini membahas tentang cara kerja politik kekeluargaan dalam Pilkada serentak di Indonesia. Menurut Muhtar Pilkada langsung dimanfaatkan sekelompok kecil keluarga yang memiliki basis material, yakni memiliki investasi politik masa lalu, jaringan yang luas dan kekayaan.

Hadirnya keluarga besar Yasin Limpo di Gowa dan TB Chasan Sochib adalah bukti kemampuan mereka dalam berkompetisi dan membajak demokrasi lokal. Dua keluarga besar ini dalam batas tertentu berhasil mengorganisir diri dalam kerangka menyalurkan ambisi politiknya dalam konteks melestarikan kuasanya di tingkat lokal.

Perbedaan dengan penelitian ini justru merujuk pada ruang lingkup penelitian, pada penelitian ini justru melihat pola kandidasi yang terjadi dalam keluarga , memfokuskan pada proses internal keluarga dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi pihak eksternal.

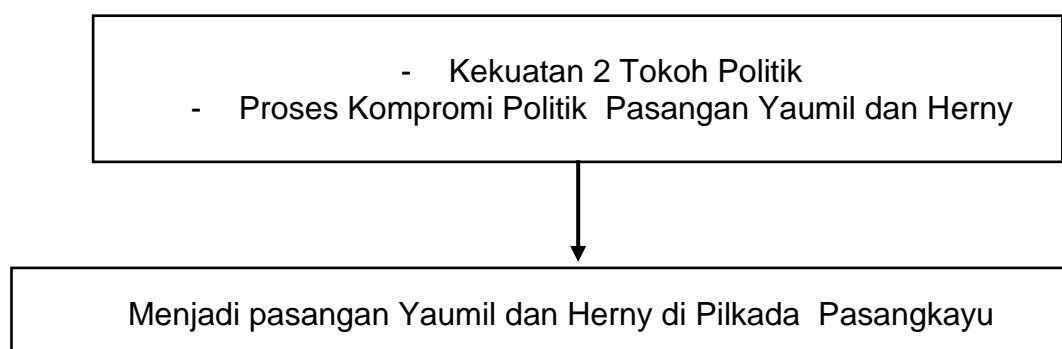
2.2.5 Muhammad Alfajri Sukri (2020) pada studinya yang berjudul Dinasti Politik di Banten : Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya partisipasi politik masyarakat, Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga Atut mempertahankan Dinasti Politik di Banten dikarenakan 2 hal pertama kuatnya akar dinasti politik yang dibentuk oleh Tubagus Chasan Sochib (Ayah Atut) dan penerapan strategi politik yang dibangun oleh keluarga Atut sehingga meskipun Atut tersandung kasus korupsi, bukan berarti Dinasti politik Atut akan hancur.

Dinasti politik di Banten begitu massif terjadi namun belum pernah ada paket pasangan calon yang berasal dari dinasti Atut , mereka selalu menggandeng pasangan calon dengan latar belakang yang berbeda. Penelitian ini justru berbeda, mengidentifikasi pola penentuan pasangan calon yang justru berasal dari keluarga yang sama yaitu Kakak & Istri dari Bupati sebelumnya. Kajian ini memiliki skop yang lebih spesifik dan mikro dalam mengidentifikasi pasangan Yaumil-Herny dalam menentukan langkah politiknya

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi mekanisme pengambilan keputusan oleh keluarga Yaumil Ambo Djiwa dalam menentukan calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari segmen keluarga Ambo Djiwa. Hal tersebut menjadi perhatian utama sebab pengambilan keputusan keluarga justru terkonversi menjadi keputusan politis.

Komposisi keluarga Ambo Djiwa yang memiliki latar belakang serta afiliasi politik yang beragam menyebabkan kandidasi dalam internal keluarga Ambo Djiwa berpotensi mengalami berbagai bentuk negosiasi atau proses kompromi kepentingan untuk menyatukan pasangan Yaumil-Herny. Familisme yang terjadi pada Keluarga Ambo Djiwa berimplikasi pada berhasilnya Yaumil Ambo Djiwa - Herny Agus maju dalam bursa calon bupati dan wakil bupati, namun perhatian utama dalam penelitian ini adalah potret familisme yang terjadi pada keluarga Ambo Djiwa berupa manuver politik figur sentral dalam keluarga Ambo Djiwa yang dapat mempengaruhi keputusan keluarga besar Ambo Djiwa.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual